



Prosedur Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pada PT. Pelabuhan Indonesia Regional 1 Cabang Kuala Tanjung Tahun 2022

Yahratun Usnan Nisa BR Pasaribu

yahratunnisa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Arnida Wahyuni Lubis

arnidawahyuni@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : yahratunnisa@gmail.com

Abstract. *Community development programs and partnerships. The Partnership Program was created to help small businesses grow and become independent. Qualitative descriptive research methodology was used for this investigation. This approach seeks to present a fairly clear picture of the problem under study. To conduct this investigation rigorously, PT. Pelindo Regional Kuala Tanjung Branch was assigned by the Partnership and Community Development Program (PKBL). Therefore, the researchers who wrote this report collected data on the value of receivables as of December 31, 2022. To make it easier for companies to understand the prospects of their partners, the company categorizes its partners in the payment of receivables. The four associate positions included in the classification are Current, Substandard, Doubtful, and Stuck. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Kuala Tanjung Branch in the period of December 31, 2022 provided loans to partners from various sectors with a total of 92 partners. The total remaining receivables in the current partner classification amounted to IDR 10,729,776,409.00,-, in the non-current partner classification amounted to IDR 5,589,839,653.00,-, in the doubtful partner classification amounted to IDR 791,912,104.00,- and the total remaining receivables in the current partner classification amounted to IDR 5,085,536,468.00,-. As we can see, the total remaining receivables between the current and current partner classifications are not too far apart like the substandard and doubtful partner classifications.*

Keywords : *Procedure, PKBL, Receivables*

Abstrak. Program pengembangan masyarakat dan kemitraan. Program Kemitraan diciptakan untuk membantu usaha kecil tumbuh dan mandiri. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penyelidikan ini. Pendekatan ini berupaya menyajikan gambaran yang cukup jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Untuk melakukan penyelidikan ini secara ketat, PT. Pelindo Regional Cabang Kuala Tanjung diberi tugas oleh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Oleh karena itu, peneliti yang menulis laporan ini mengumpulkan data nilai piutang per 31 Desember 2022. Untuk memudahkan perusahaan memahami prospek mitranya, maka perusahaan mengkategorikan mitranya dalam pembayaran piutang. Empat posisi rekanan yang masuk klasifikasi adalah Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung pada periode 31 Desember 2022 memberikan pinjaman kepada mitra dari berbagai sektor dengan total sebanyak 92 Mitra. Total sisa piutang pada klasifikasi mitra lancar sebesar Rp

Received Agustus 30, 2023; Revised September 25, 2023; Accepted Oktober 09, 2023

* Yahratun Usnan Nisa BR Pasaribu. yahratunnisa@gmail.com

10.729,776,409.00,-, pada klasifikasi mitra kurang lancar sebesar Rp5.589,839,653.00,- ,pada klasifikasi mitra diragukan sebesar Rp 791.912,104.00,- dan total sisa piutang pada klasifikasi mitra macat adalah sebesar Rp5.085,536,468.00,-.Seperti yang kita lihat total sisa piutang antara klasifikasi mitra lancar dan macat tidak terlalu jauh seperti klasifikasi mitra kurang lancar dan diragukan.

Kata Kunci : Prosedur, PKBL, Piutang

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang salah satunya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam kelangsungan hidup perusahaan di masa depan seiring dengan meningkatnya pengetahuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kalangan pelaku usaha. PP tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kontraktor, Perum, dan Persero diterbitkan pada tahun 1983, menandai dimulainya PKBL. Program Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan kadang disingkat perusahaan PEGELKOP kemudian diperkenalkan pada tahun 1989. Nama program diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah berjalan sejak tahun 2003 dan masih berjalan dengan baik hingga saat ini. PKBL adalah program CSR eksklusif yang hanya tersedia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL) merupakan dua jenis program pembentuk PKBL. PK merupakan program yang mewajibkan BUMN memberikan pinjaman usaha dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian BL adalah program yang diberikan melalui bantuan keuangan untuk program/kegiatan pengembangan masyarakat. Area fokus dari kedua program ini adalah wilayah dimana suatu BUMN beroperasi.

Program Kemitraan (PK) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar tumbuh tangguh dan mandiri. Inisiatif ini terutama berfokus pada UMKM yang tidak dapat dibiayai oleh bank atau belum memiliki akses terhadap pinjaman tersebut. Karena semua bank saat ini menerima atau bahkan telah menerapkan metode “Pick the Ball” untuk memberikan pinjaman kepada UMKM dengan suku bunga yang sangat terjangkau, namun saya menyadari bahwa sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan status Non-Bankable Bila diberikan kepada mitra binaannya oleh organisasi PKBL, penerimanya hanya menerima bonus tahunan flat rate sekitar 6% dan pelatihan “gratis” berupa peningkatan kapasitas pelatihan atau mendapat promosi tingkat nasional. pameran berskala besar atau melibatkan pasar.

Tentu saja, sejumlah prosedur harus diikuti oleh pihak korporasi selama PKBL dilaksanakan agar program tersebut terealisasi dan tetap mendapat apresiasi positif dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul. “TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PADA PT. PELABUHAN REGIONAL INDONESIA 1 CABANG KUALA TANJUNG TAHUN 2022”

TINJAUAN TEORITIS

Secara umum pengertian BUMN adalah suatu badan usaha yang kepemilikannya sebagian atau seluruh kekayaannya dikuasai oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dan berasal dari kekayaan negara tersendiri. Lima Prioritas Kementerian BUMN

1. Nilai Ekonomi dan Sosial Indonesia Meningkatnya nilai ekonomi dan dampak sosial, khususnya di bidang energi, kesehatan, dan ketahanan pangan.
2. Model Bisnis Baru
3. Restrukturisasi model bisnis melalui penciptaan ekosistem, kerja sama tim, identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan, dan pendekatan inti yang berfokus pada bisnis Kepemimpinan Teknologi Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kemampuan digital seperti pengelolaan data, manajemen tingkat lanjut, data besar, kecerdasan buatan, dan lain-lain.
4. Peningkatan Investasi
Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.
Talent Development Mendidik dan melatih tenaga kerja, mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memprofesionalkan tata kelola SDM dan sistem seleksi. Menurut teori yang dikemukakan oleh John Elkington (1997), CSR adalah suatu keadaan dimana perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian pada peningkatan kualitas perusahaan (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM) adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bentuk kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi

masyarakat dan kondisi perekonomian. lingkungan sosial masyarakat sekitar yaitu adanya program kemitraan dan bina lingkungan. (PKBL) sebagai bagian dari Aksi Korporasi. Program Kemitraan Usaha Kecil Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar bertanggung jawab dan mandiri melalui dukungan permodalan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan terampil dalam rangka mendukung pemasaran dan kelangsungan usaha di masa depan. Pembangunan Lingkungan Hidup digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan sarana dan prasarana umum.

Menurut Notoatmodjo (2003), Kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Selama ini istilah kemitraan dikenal dengan beberapa nama, antara lain kerjasama strategis dengan pelanggan (Strategic Customer Alliance), kerjasama strategis dengan pemasok (strategic Supplier Alliance), dan pemanfaatan sumber daya kemitraan (partnership Sourcing).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terdiri dari dua jenis program, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Pelaksanaan program kemitraan dilakukan dengan menyalurkan sejumlah dana berupa pinjaman untuk tujuan tertentu dan biaya pembinaan kepada mitra binaan yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Sedangkan Program Bina Lingkungan atau Program BL merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang dilakukan oleh BUMN. Penyelenggaraan program kemitraan dan program BL dikelola oleh Program Kemitraan dan Unit Program BL pada organisasi BUMN binaan sebagai pelaksana Program Kemitraan dan/atau Program BL. Penyaluran dana program BL diberikan dalam bentuk bantuan untuk tujuan tertentu.

Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara harus diperbaiki agar Badan Usaha Milik Negara dapat berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan

yang dampaknya lebih terintegrasi, terfokus, dan terukur. Perubahan terakhir dilakukan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Bagi Badan Usaha Milik Negara.

Hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki PKBL, semacam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bina Lingkungan (BL) dan Program Kemitraan (PK) merupakan dua jenis program berbeda yang membentuk PKBL. Dalam program PK, BUMN harus memberikan pinjaman dan memberikan pendampingan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, BL merupakan program yang menawarkan pendanaan untuk program dan kegiatan yang mendorong pengembangan masyarakat. Wilayah dimana suatu BUMN bekerja menjadi fokus utama program masing-masing.

Program Kemitraan (PK) diciptakan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian UMKM. UMKM yang termasuk dalam status non-bankable atau belum memiliki akses terhadap pinjaman modal dari bank menjadi tujuan utama dari inisiatif ini. Namun saya menyadari bahwa status Non-Bankable sulit untuk diartikan mengingat saat ini semua bank telah menerima atau sudah menerapkan metode “Pick the Ball” dalam memberikan pinjaman kepada UMKM dengan suku bunga yang relatif rendah.

Namun kelebihan PK dibandingkan perbankan adalah mitra yang menerima pinjaman dari badan PKBL hanya membayar bunga tetap sebesar 6% per tahun dan mendapatkan pembinaan “gratis” berupa pelatihan dan promosi dalam bentuk keikutsertaan dalam skala besar, pameran atau bazar nasional. Sejumlah prosedur yang harus dipenuhi dalam menjalankan PKBL tentunya dilakukan agar program tersebut bisa terealisasi dan tetap mendapat apresiasi positif dari masyarakat sekitar.

Berikut pedoman penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah pada Program Pendanaan UMK:

1. Calon pelaku usaha kecil dan mikro menyampaikan rencana dan/atau usulan kegiatan usaha kepada BUMN yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat unit usaha;
 - b. Nama dan alamat pemilik/pengelola unit usaha;
 - c. Bukti identitas pemilik/pengelola
 - d. Bidang Usaha;

- e. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - f. Akun bank;
 - g. Rencana bisnis dan kebutuhan pendanaan; dan
 - h. Surat pernyataan tersebut menunjukkan bahwa unit usaha tersebut tidak pernah dan/atau tidak akan beroperasi bersama dengan perusahaan/BUMN lain.
2. BUMN meninjau dan menilai permintaan dukungan yang dibuat oleh usaha kecil dan mikro
 3. Dalam hal suatu BUMN mengakuisisi calon usaha kecil dan mikro, maka calon usaha kecil dan mikro tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu proses administrasi terkait dengan rencana modal kerja yang ditawarkan oleh perusahaan/BUMN yang bersangkutan sebelum mengadakan perjanjian.
 4. Surat perjanjian dan/atau kontrak yang menyatakan pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan kecil paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: Nama dan alamat usaha/BUMN serta usaha mikro dan kecil yang dibantu;
 - a. Jangka waktu pinjaman (setidaknya jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok, dan layanan pengelolaan pinjaman);
 - b. hak dan kewajiban Badan Usaha/BUMN penerima serta usaha kecil dan mikro;
 - c. Jumlah pinjaman dan penyalurannya;
 - d. Besarnya jasa pengelolaan pinjaman, margin jual beli, atau nisbah bagi hasil.

Metode penelitian

Untuk pemeriksaan ini, metodologi penelitian deskriptif kualitatif digunakan. Dengan pendekatan ini, kami ingin menyajikan gambaran yang cukup menyeluruh mengenai masalah yang kami teliti. Lokasi utama penelitian ini adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Cabang Kuala Tanjung di kawasan Pelindo. Nilai piutang per 31 Desember 2022 menjadi variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Data tersebut penulis peroleh dari unit Sumber Daya Manusia Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Jenis Data

Informasi yang bersifat kualitatif, berupa data kondisional atau gambaran kualitas objek yang diteliti, merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan per 31 Desember (PKBL PT Pelabuhan), kualitas pinjaman mitra dalam hal ini meliputi pinjaman lancar, pinjaman subprime, pinjaman meragukan, dan pinjaman bermasalah dan akan berdampak pada kinerja keuangan. satuan

PKBL. Tahun 2022 Cabang Kuala Tanjung Indonesia Wilayah 1 (Persero) Data laporan dalam hal ini yang dirilis untuk penelitian pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Data SDM Kepesertaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Teknik pengumpulan³²²

Metode dokumen digunakan dalam teknik pengumpulan data, atau teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada atau catatan-catatan yang berupa transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain. Pendataan dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung melalui permintaan salinan fisik atau soft copy dokumen secara langsung, serta melalui peminjaman laporan terkait dari Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia PKBL.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan Program TJSL BUMN adalah untuk:
2. Memberikan manfaat bagi tata kelola perusahaan, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lingkungan hidup.
3. Menciptakan nilai tambah bagi perusahaan berdasarkan prinsip komprehensif, terarah, terukur dan bertanggung jawab.
4. Mengembangkan usaha mikro dan kecil agar mereka, dan masyarakat di sekitarnya, lebih tangguh dan mandiri.

Rencana Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan jadwal kerja perusahaan dan anggaran yang disetujui oleh RUPS/Menteri. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan program PKBL BUMN:

1. Mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil, dan/atau
2. Memberikan dukungan dalam bentuk pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan taraf wilayah. Sampai dengan plafon Usaha Mikro dan Kecil sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Skema Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil menawarkan modal kerja dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan syariah. Dengan jangka waktu pinjaman maksimal tiga tahun, modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman dikenakan biaya pengelolaan tahunan sebesar 6%.

Bisnis ini menawarkan pinjaman kepada berbagai divisi bisnis berdasarkan rencana PKBL ini.

Pedoman berikut ini menjadi pedoman pelaksanaan program TJSL BUMN:

1. menyeluruh, berdasarkan proses korporasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan penilaian risiko;
2. Arah yang jelas khususnya dalam mencapai tujuan usaha;
3. Dampak terukur, yang mencakup perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan melalui kontribusi dan manfaat; Dan keempat,
4. akuntabilitasyaitu mengambil tanggung jawab untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan Penyimpangan. Terdapat beberapa sektor yang mendapatkan pinjaman atas program kemitraan pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung Yaitu :

Tabel 1 Daftar dan Jumlah Sektor Penerima Program Kemitraan PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung Per 31 Desember 2022

No	Nama Sektor	Jumlah
1	Sektor Industri	8
2	Sektor Jasa	17
3	Sektor Perdagangan	39
4	Sektor Perikanan	2
5	Sektor Peternakan	5
6	Sektor Perkebunan	14
7	Sektor Pertanian	7
Total Mitra		92

Berdasarkan informasi program kemitraan dan bina lingkungan PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Belawan, sektor perdagangan memperoleh pinjaman program BUMN paling banyak dari seluruh industri lain yang mendapat pinjaman dari dunia usaha. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian Program PKBL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau tujuan Program PKBL BUMN yang diatur dalam Rencana Kerja, maka Program PKBL BUMN dilaksanakan secara sistematis dan terpadu. Sebelum mendapatkan pinjaman usaha di PKBL BUMN ini, mitra harus melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Implementasi
3. pemantauan dan
4. pemantauan dan penilaian

Mitra dikategorikan oleh perusahaan saat membayar piutang, sehingga memudahkan perusahaan untuk melihat calon mitra. Keempat jenis peran mitra tersebut adalah Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Per 31 Desember 2022, mitra kerja PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2 Klasifikasi Piutang Lancar Kemitraann PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung Per 31 Desember 2022

BULAN	Lancar	
	Jumlah Mitra	Rp
Jan-22	69	Rp 1,576,324,541.00
Feb-22	27	Rp 1,504,556,603.00
Mar-22	24	Rp 1,336,480,227.00
Apr-22	23	Rp 1,174,265,380.00
Mei-22	72	Rp 1,052,566,197.00
Jun-22	22	Rp 1,050,364,345.00
Jul-22	21	Rp 993,067,095.00
Agust-22	70	Rp 801,924,930.00
Sep-22	17	Rp 728,864,876.00
Okt-22	16	Rp 599,471,814.00
Nov-22	12	Rp 468,445,044.00
Des-22	12	Rp 443,445,357.00
Total		Rp 10.729,776,409.00

Tabel 3 Klasifikasi Piutang Kurang Lancar Kemitraann PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung Per 31 Desember 2022

Kurang Lancar		
BULAN	Jumlah Mitra	Rp
Januari 2022	10	Rp 469,243,590,00
Februari 2022	10	Rp 349,448,590.00
Maret 2022	12	Rp 400,092,371.00
April 2022	11	Rp 480,249,090.00
Mei 2022	10	Rp 510,364,501.00
Juni 2022	8	Rp 413,988,071.00
Juli 2022	8	Rp 408,553,071.00
Agustus 2022	10	Rp 404,884,688.00
September 2022	10	Rp 407,481,391.00
Oktober 2022	12	Rp 611,856,511.00
November 2022	14	Rp 692,287,185.00
Desember 2022	10	Rp 441,390,594.00
Total		Rp 5.589,839,653.00

Tabel 4 Klasifikasi Piutang Diragukan Kemitraann PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung Per 31 Desember 2022

Diragukan		
BULAN	Jumlah Mitra	Rp
Januari 2022	1	Rp 745,000.00
Februari 2022	1	Rp 91,823,000.00
Maret 2022	1	Rp 91,691,000.00

April 2022	1	Rp 91,691,000.00
Mei 2022	0	Rp 0
Juni 2022	1	Rp 14,539,091.00
Juli 2022	1	Rp 14,539,091.00
Agustus 2022	2	Rp 154,539,091.00
September 2022	2	Rp 156,031,000.00
Oktober 2022	1	Rp 16,031,000.00
November 2022	1	Rp 16,031,000.00
Desember 2022	4	Rp 235,942,831.00
Total		Rp 791.912,104.00

Tabel 5 Klasifikasi Piutang Macat Kemitraann PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung Per 31 Desember 2022

Macat		
BULAN	Jumlah Mitra	Rp
Januari 2022	12	Rp 491,447,092.00
Februari 2022	12	Rp 485,557,092.00
Maret 2022	11	Rp 484,812,092.00
April 2022	9	Rp 360,925,092.00
Mei 2022	10	Rp 452,616,092.00
Juni 2022	10	Rp 432,385,092.00
Juli 2022	10	Rp 432,385,092.00
Agustus 2022	10	Rp 432,385,092.00
September 2022	10	Rp 374,248,183.00
Oktober 2022	10	Rp 374,248,183.00

November 2022	10	Rp 374,248,183.00
Desember 2022	11	Rp 390,279,183.00
Total		Rp 5.085,536,468.00

Dari data- data yang telah di dapatkan, PT Pelabuhan Indoneisa Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung pada periode 31 Desember 2022 memberikan pinjaman kepada mitra dari berbagai sektor dengan total sebanyak 92 Mitra. Total sisa piutang pada klasifikasi mitra lancar sebesar Rp 10.729,776,409.00,- , pada klasifikasi mitra kurang lancar sebesar Rp5.589,839,653.00,- ,pada klasifikasi mitra diragukan sebesar Rp 791.912,104.00,- dan total sisa piutang pada klasifikasi mitra macat adalah sebesar Rp5.085,536,468.00,-.Seperti yang kita lihat total sisa piutang antara klasifikasi mitra lancar dan macat tidak terlalu jauh seperti klasifikasi mitra kurang lancar dan diragukan. Berdasarkan temuan wawancara yang diprakarsai oleh penelitian, alasan utama mengapa suatu bisnis gagal membayar kembali pinjaman usahanya mencakup penurunan penjualan atau permintaan pelanggan, peningkatan biaya bahan baku yang penting bagi operasional bisnis, dan tentu saja dampak pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Wilayah 1 Kuala Tanjung melaksanakan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan. dan pilar utama yang mendasari sistem ini dibangun adalah sebagai berikut:

1. Sosial, untuk mencapai realisasi hak asasi manusia yang adil dan setara guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat;
2. Lingkungan Hidup, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan guna menunjang seluruh kehidupan;
3. Ekonomi, untuk yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif melalui lapangan kerja dan peluang usaha yang berkelanjutan, inovasi, industri inklusif, infrastruktur yang memadai, energi bersih yang murah dan dukungan melalui kolaborasi; Dan
4. Hukum dan pemerintahan, untuk menciptakan kepercayaan terhadap supremasi hukum dan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk

menciptakan stabilitas keamanan dan mewujudkan negara berdasarkan supremasi hukum.

Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra manfaat BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. Perusahaan mikro dan kecil yang tidak memenuhi standar atau tidak mempunyai akses terhadap pinjaman dari lembaga keuangan atau bank;
3. Usaha mikro dan kecil yang jenis pekerjaannya sesuai dan/atau menunjang kegiatan utama Perusahaan/Usaha;
4. Prioritas diberikan kepada usaha kecil dan menengah yang berada dalam wilayah pelayanan BUMN;
5. Bersifat independen, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikendalikan, atau terafiliasi dengan perusahaan menengah atau besar;
6. Didirikan sebagai suatu usaha oleh orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, suatu usaha yang tidak berbadan hukum, atau suatu usaha yang berbadan hukum, termasuk perusahaan kecil dan rekan kerja.
7. Memiliki kemampuan dan prospek usaha untuk berkembang

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada PKBL BUMN ini sebelum mitra mendapatkan pinjaman dari perusahaan harus melewati tahap-tahap berikut ini:

1. Perencanaan
2. Implementasi
3. Pengawasan dan
4. Pemantauan dan evaluasi

Dalam Pembayaran Piutang, Untuk memudahkan pelaku usaha memahami prospek mitranya, perusahaan melakukan kategorisasi mitranya. Jabatan rekanan dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. PT Pelabuhan Indoneisa Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung pada periode 31 Desember 2022 memberikan pinjaman kepada mitra dari berbagai sektor dengan total sebanyak 92 Mitra. Total sisa piutang pada klasifikasi mitra lancar sebesar Rp 10.729,776,409.00,- , pada

klasifikasi mitra kurang lancar sebesar Rp5.589,839,653.00,- ,pada klasifikasi mitra diragukan sebesar Rp 791.912,104.00,- dan total sisa piutang pada klasifikasi mitra macat adalah sebesar Rp5.085,536,468.00,-.Seperti yang kita lihat total sisa piutang antara klasifikasi mitra lancar dan macat tidak terlalu jauh seperti klasifikasi mitra kurang lancar dan diragukan. Wawancara peneliti dengan pemilik usaha mengungkapkan bahwa penurunan permintaan atau penjualan konsumen, kenaikan harga bahan baku yang dibutuhkan usaha, dan tentunya dampak wabah Covid-19 yang masih berlangsung menjadi alasan utama pembayaran pinjaman kepada perusahaan yang gagal di kembalikan.

Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Pelayanan Sosial dan Lingkungan Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Masyarakat dengan Tata Cara Pelaksanaan yang Tercatat, PT. Pelabuhan Indonesia Regional 1 (Persero) Cabang Kuala Tanjung melaksanakan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup.

B. Saran

Hal ini dimaksudkan agar kegiatan kemitraan dan pengembangan masyarakat yang ada saat ini dapat dipertahankan dan semaksimal mungkin ditingkatkan. Dengan tujuan untuk lebih berkonsentrasi pada implementasi di sektor perikanan dan konservasi kelautan, juga akan meningkatkan kualitas mitra, memberikan lebih banyak pendampingan, dan meningkatkan jumlah mitra.

DAFTAR PUSTAKA

Sudirwo,2020. *Implementasi program kemitraan BUMN terhadap pemberdayaan UMKM di kota Banjarbaru*. Banjarmasin : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia. Jurnal Ilmiah ekonomi bisnis.

Rahmadhita Dewisari,Robi Syaiful Ubed,2021.*Penyaluran Dana Program Kemitraan dan bina lingkungan (PKBL)dan kinerja keuangan BUMN*. Jakarta:PKN STAN. Jurnal Indonesia Rich,Vol 2.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

<https://koinworks.com/blog/bumn-adalah/> di akses pada tanggal 13 Maret 2022,Pukul 10:00

<https://bumn.go.id/> di akses pada tanggal 13 Maret 2022,pukul 10:00